

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi informasi telah mengubah cara organisasi dalam mengelola dan menganalisis data, termasuk di sektor pemerintahan. Salah satu perkembangan teknologi yang signifikan adalah penggunaan *big data*, yang telah menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintahan. Menurut (Gartner, 2020), *big data* didefinisikan sebagai aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, atau beraneka ragam yang menuntut bentuk-bentuk pemrosesan informasi yang inovatif dan hemat biaya untuk peningkatan wawasan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, pemanfaatan *big data* menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas dan volume transaksi keuangan yang terus meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi *big data analytics* di sektor publik Indonesia dapat meningkatkan akurasi pelaporan keuangan hingga 35% dan mengurangi kesalahan pencatatan hingga 42%. Hal ini mengindikasikan bahwa *big data* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selain penggunaan *big data*, efektivitas perencanaan anggaran juga memegang peranan vital dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Perencanaan anggaran yang efektif mencerminkan kemampuan organisasi dalam

mengalokasikan sumber daya secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian (Nina Anggraini Anandah & Muhammad Aufa, 2023), penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang efektif secara signifikan berdampak pada efektivitas kinerja pemerintah, yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan kepatuhan terhadap peraturan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan komponen integral lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Framework COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) menekankan pentingnya SPI dalam menciptakan tata kelola yang baik dan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Penelitian (Haerunnisa, Linda Arisanty Razak, & Muchriana Muchran, 2024), peneliti ini menunjukkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Perkebunan Nusantara XIV dengan pengaruh sebesar 20,5%.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih terdapat 15% instansi pemerintah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengindikasikan masih adanya ruang untuk peningkatan kualitas laporan keuangan melalui optimalisasi penggunaan *big data*,

perencanaan anggaran yang lebih efektif, dan penguatan sistem pengendalian internal.

Perkembangan teknologi *big data* telah membuka peluang baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Menurut (Satrio, 2022), implementasi *big data analytics* dapat membantu mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien dan potensi kebocoran anggaran secara *real-time*. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Efektivitas perencanaan anggaran menjadi semakin crucial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penelitian (Pratama, Kusuma, & Wijaya, 2023), menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang memiliki perencanaan anggaran yang efektif mampu beradaptasi lebih baik terhadap perubahan kondisi ekonomi dan tetap menjaga kualitas laporan keuangannya. Hal ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dalam menjamin sustainability keuangan pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal yang kuat menjadi fondasi penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut studi longitudinal yang dilakukan oleh (Wijaya, 2021) selama periode 2018-2022, instansi pemerintah dengan SPI yang kuat memiliki probabilitas 3,5 kali lebih tinggi untuk mendapatkan opini WTP dibandingkan instansi dengan SPI yang lemah.

Dalam konteks Indonesia, implementasi *big data*, efektivitas perencanaan anggaran, dan sistem pengendalian internal masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan,

dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi hambatan yang perlu diatasi. Namun, keberhasilan beberapa instansi pemerintah dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik adalah sesuatu yang *achievable* (dapat dicapai/diwujudkan secara realistis).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muchlis, 2017), tentang pengaruh teknologi *big data* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan di bursa efek Indonesia penelitian ini menunjukkan pengaruh *big data* terhadap kinerja keuangan dan memiliki hasil nilai p-value BD terhadap *ROA* maupun *ROE* adalah sebesar 0,0000 dan 0,0435, dimana nilai keduanya baik *ROA* maupun *ROE*  $< \alpha$  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi *big data* signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, baik dengan menggunakan pengukuran *Return On Assets (ROA)* maupun dengan pengukuran *Return on Equity (ROE)*.

Dalam aspek perencanaan anggaran, penelitian komparatif yang dilakukan oleh (Hartono & Putri, 2023) di lima negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal adopsi teknologi untuk perencanaan anggaran. Hal ini menegaskan urgensi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi modern dan *best practices internasional*.

Sementara itu, studi komprehensif yang dilakukan oleh (Permana, Rahman, & Sari, 2022) terhadap 120 satuan kerja pemerintah daerah mengungkapkan bahwa hanya 45% yang telah mengimplementasikan SPI sesuai

dengan standar COSO secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan masih adanya gap yang signifikan dalam implementasi SPI yang efektif di instansi pemerintahan Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, termasuk di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun *big data* telah menjadi tren dalam pengolahan data keuangan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan di instansi ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023, masih terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan aset dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan *big data* belum optimal. Selain itu, efektivitas perencanaan anggaran yang kurang efektif terlihat dari adanya persamaan dari anggaran yang direncanakan dengan realisasinya pada tahun anggaran 2023. Untuk mengetahui penyebab dan pertanggung jawaban dari kesamaan tersebut maka diperlukan perencanaan anggaran yang efektif. Sistem pengendalian internal juga masih menunjukkan kelemahan, dimana ditemukan beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan dalam ketiga aspek tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat tiga variabel independen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penggunaan *Big Data* memiliki peran penting dalam

meningkatkan kualitas laporan keuangan karena memungkinkan pengolahan data yang lebih komprehensif dan akurat, sehingga informasi yang dihasilkan lebih dapat diandalkan. Sementara itu, efektivitas perencanaan anggaran berkontribusi dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas melalui perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat. Sistem pengendalian internal yang baik juga menjadi faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur, meminimalkan risiko kesalahan, dan menjaga integritas data keuangan. Ketiga variabel independen ini bekerja secara sinergis dalam mempengaruhi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023, persentase realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2023 telah dicapai sebesar 79,19% dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022, realisasi belanja daerah telah dicapai dengan persentase lebih tinggi, yaitu sebesar 90,38%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan anggaran serta pengendalian internal telah dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menyesuaikan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (LRA Kabupaten Aceh Tenggara, 2023).

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 telah dianalisis melalui perspektif big data, dimana fenomena menarik telah ditemukan. Pendapatan daerah hanya direalisasikan sebesar 60,03% dari anggaran

yang telah ditetapkan, dengan retribusi pemakaian kendaraan bermotor yang tidak berhasil direalisasikan sama sekali (0%). Namun, retribusi pemakaian laboratorium telah melampaui target hingga 157,83%, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam perkiraan pendapatan yang telah dibuat. Untuk belanja, anggaran telah direalisasikan sebesar 79,19%, dengan belanja pegawai yang telah direalisasikan dengan tingkat tinggi (98,75%) sementara beberapa pos modal seperti Belanja Modal Alat Rumah Tangga hanya dapat direalisasikan sebesar 30,86%. Tantangan dalam manajemen proyek infrastruktur telah diindikasikan oleh pola ini, terutama pada beberapa belanja pemeliharaan seperti Belanja Pemeliharaan Tanah dan Belanja Pemeliharaan Gedung yang sama sekali tidak direalisasikan (0%). Sehingga pentingnya analisis big data dalam perencanaan anggaran untuk mengidentifikasi pola historis, memprediksi kebutuhan riil, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya telah ditunjukkan oleh fenomena ini, sehingga kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran di masa mendatang dapat diminimalkan (LRA Kabupaten Aceh Tenggara, 2023)

Selain itu, efektivitas perencanaan anggaran telah dijadikan sebagai faktor kunci dalam menentukan kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Ketidaksesuaian realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan sebagai indikasi adanya permasalahan dalam perencanaan atau pengelolaan dana. Pada tahun 2023, anggaran belanja pemeliharaan jalan dan jembatan telah direalisasikan sebesar 96,70%, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 97,38%. Hal ini dapat diindikasikan sebagai adanya perubahan strategi penganggaran atau

efisiensi dalam penggunaan dana. Secara keseluruhan, keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat diamati melalui perbandingan data anggaran dari tahun ke tahun. Semakin baik pemanfaatan big data, efektivitas perencanaan, dan pengendalian internal, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dapat dihasilkan (LRA Kabupaten Aceh Tenggara, 2023).

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan diatas, penelitian mengenai “pengaruh penggunaan *big data*, efektivitas perencanaan anggaran, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan” menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penggunaan *Big Data* terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Sejauh mana efektivitas perencanaan anggaran mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan *Big Data* terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh efektivitas perencanaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengkaji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara

#### **1.4 Batasan Masalah Penelitian**

Agar mendapat gambaran yang sesuai mengenai masalah yang dibahas pada penelitian ini, maka perlu diberikan batas pembahasan yang nantinya lebih terfokus pada penelitian ini. Berikut batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian dilakukan hanya pada instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Waktu penelitian berfokus pada periode 3 tahun terakhir
3. Penelitian ini akan berfokus pada penggunaan *Big Data* dalam konteks pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, tidak mencakup penggunaan *Big Data* untuk tujuan lain di pemerintahan.
4. Batasan pada aspek-aspek spesifik dari perencanaan anggaran yang relevan dengan kualitas laporan keuangan, tidak mencakup seluruh proses penganggaran.
5. Penelitian akan dibatasi pada elemen-elemen sistem pengendalian internal yang berkaitan langsung dengan penyusunan laporan keuangan.

6. Fokus pada indikator-indikator kualitas laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka dalam penelitian diharapkan :

1. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan *big data* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, Sebagai evaluasi terhadap efektivitas perencanaan anggaran yang telah dilakukan dan Sebagai bahan perbaikan sistem pengendalian internal yang sudah berjalan.
2. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan Menambah wawasan tentang implementasi *big data* di sektor pemerintahan serta Memahami hubungan antara variabel penelitian big data, efektivitas perencanaan anggaran, dan sistem pengendalian internal
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa Sebagai referensi untuk penelitian serupa di instansi pemerintahan, dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dengan variabel yang sama.